

Konstruksi Kritik Publik Dalam Ruang Publik Digital Pada #Indonesiagelap Di Platform X

Mohamad Rifaldi Naudi^{1*}, Yowan Tamu, Muhammad Akram Mursalim

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Oktober 8, 2026 Revised Oktober 8, 2026 Accepted Oktober 8, 2026 Kata Kunci: Kritik publik, Ruang publik digital, #IndonesiaGelap, Platform X, Teori wacana Keywords: <i>Public criticism, Digital public sphere, #IndonesiaGelap, Platform X, Discourse theory</i>	Penelitian ini menganalisis konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital melalui #IndonesiaGelap di Platform X. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif deskriptif, dan analisis isi kualitatif terhadap 87 unggahan yang dipilih secara purposif pada periode 17–21 Februari 2025. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi non-partisipan, kemudian dianalisis dengan open coding, refinement coding, dan interpretasi Discourse Theory Laclau dan Mouffe. Hasil penelitian mengidentifikasi 18 elemen kritik publik yang mencakup persoalan politik, kebijakan pemerintah, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan demokrasi. Elemen-elemen tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi muncul bersama dan membentuk relasi diskursif dalam unggahan pengguna. #IndonesiaGelap berfungsi sebagai nodal point sekaligus empty signifier yang menghubungkan beragam tuntutan melalui articulation dan chain of equivalence. Hubungan antagonistik antara warga dan praktik kekuasaan yang dikritik turut memperkuat solidaritas serta membentuk hegemoni wacana kritik. Penelitian menyimpulkan bahwa tagar tersebut bukan hanya penanda percakapan, melainkan arena konstruksi makna kolektif mengenai kondisi penyelenggaraan negara. ABSTRACT This study analyzes the construction of public criticism in the digital public sphere through #IndonesiaGelap on Platform X. Adopting a constructivist paradigm and descriptive qualitative approach, the study applies qualitative content analysis to 87 purposively selected posts published on February 17–21, 2025. Data were collected through documentation and non-participant observation, then analyzed using open coding, refinement coding, and Laclau and Mouffe's Discourse Theory. The findings identify 18 elements of public criticism encompassing political issues, government policies, economic concerns, education, social welfare, and democracy. These elements coexist and form discursive relationships across user posts. #IndonesiaGelap serves as both a nodal point and an empty signifier that links diverse demands through articulation and chains of equivalence. Antagonistic relationships between citizens and criticized forms of power strengthen political solidarity and contribute to the hegemony of a critical discourse. The study concludes that the hashtag is not merely a conversation label but also a space where collective meanings concerning state governance are constructed.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Mohamad Rifaldi Naudi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo,
Gorontalo, Indonesia
Email: projectnaudi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan menegosiasikan makna di ruang

sosial. Internet tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, melainkan telah menjadi infrastruktur utama bagi interaksi publik yang berlangsung secara terus-menerus, lintas batas ruang dan waktu. Dalam konteks Indonesia, intensitas perubahan tersebut terlihat dari tingginya penetrasi digital. Pada awal 2025 tercatat 212 juta individu menggunakan internet dan 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik semakin banyak berlangsung melalui platform digital, sehingga proses pembentukan opini, penyebaran isu, dan ekspresi keberatan warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ruang-ruang komunikasi konvensional [12].

Transformasi tersebut turut mengubah pola komunikasi publik dari model yang bersifat terpusat menjadi komunikasi yang semakin terbuka, interaktif, dan berjejaring. Perkembangan internet dan media sosial memungkinkan individu tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen sekaligus penyebar informasi yang berpartisipasi dalam percakapan publik secara langsung. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, ruang publik digital berkembang sebagai jaringan komunikasi yang memungkinkan berbagai aktor saling terhubung, membentuk perhatian bersama, serta memproduksi dan menegosiasikan makna melalui interaksi yang berlangsung secara real-time. Dengan demikian, ruang publik digital tidak lagi dipahami sebagai ruang fisik, melainkan sebagai ruang komunikasi yang dibentuk oleh konektivitas antarpengguna, fitur platform digital, dan dinamika jaringan komunikasi.

Dalam ruang komunikasi yang berjejaring tersebut, media sosial menjadi salah satu arena utama berlangsungnya pembentukan dan pertukaran wacana publik. Karakteristik media sosial memungkinkan pengguna memproduksi, menyebarkan, merespons, dan menghubungkan berbagai informasi secara cepat melalui jaringan komunikasi yang saling terhubung. Kondisi tersebut menjadikan media sosial bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang tempat berbagai makna, aspirasi, tuntutan sosial, dan posisi politik dinegosiasikan melalui interaksi antarpengguna. Di sisi lain, keterbukaan komunikasi digital juga memungkinkan munculnya kontestasi berbagai wacana, sehingga media sosial menjadi arena tempat beragam kelompok mengartikulasikan kepentingan, membangun solidaritas, sekaligus memperdebatkan isu-isu publik.

Platform X menjadi salah satu ruang yang paling menonjol dalam percakapan publik, khususnya percakapan yang bernuansa politik. Secara resmi, X menyatakan diri sebagai ruang untuk melayani “public conversation”, dan pada akun publik, unggahan pengguna bersifat terbuka sehingga dapat dilihat serta diinteraksikan oleh siapa pun secara default (X, n.d.). Selain itu, X menjelaskan bahwa tagar digunakan untuk mengategorikan unggahan, mempermudah pencarian, dan menghubungkan satu percakapan dengan percakapan lain melalui topik yang sama. Konten yang menggunakan tagar populer juga berpotensi masuk ke daftar tren (X, n.d.). Fitur tren dan pencarian pada X memperlihatkan bahwa platform ini memang dirancang untuk mengakumulasi percakapan massal secara real-time, sehingga sangat relevan sebagai arena berkembangnya percakapan publik, penyebaran berbagai kritik sosial dan politik, serta pembentukan perhatian kolektif terhadap isu-isu tertentu (X, n.d.). Dalam perspektif ruang publik digital, karakteristik ini menjadikan X sebagai ruang yang tidak hanya memfasilitasi penyebaran informasi, tetapi juga mengonsolidasikan perhatian publik atas isu tertentu.

Salah satu instrumen paling penting dalam pembentukan wacana di platform tersebut adalah hashtag. Secara fungsional, hashtag membantu mengelompokkan unggahan berdasarkan kata kunci, memudahkan pengguna menemukan percakapan yang sejenis, dan memungkinkan suatu isu bergerak menjadi topik yang lebih luas di ruang digital (X, n.d.). Dalam praktik media sosial, hashtag telah berkembang dari sekadar alat pengindeksan menjadi mekanisme agregasi isu, mobilisasi percakapan, dan artikulasi identitas kolektif. Dalam konteks tersebut, hashtag juga memungkinkan berbagai isu, pengalaman, dan aspirasi publik dihimpun ke dalam suatu penanda bersama yang mempermudah terbentuknya percakapan kolektif di ruang digital. Tinjauan sistematis mengenai komunikasi melalui hashtag dalam gerakan sosial menunjukkan bahwa hashtag telah menjadi sarana komunikasi yang signifikan dalam berbagai gerakan sosial lintas isu [25]. Kajian lain tentang aktivisme tagar di Indonesia juga menegaskan bahwa hashtag activism dapat bekerja sebagai bagian dari demokrasi siber ketika

penetrasi internet luas dan penggunaan media sosial telah menjadi praktik yang umum di masyarakat [33]. Dengan demikian, hashtag tidak dapat dipandang hanya sebagai simbol teknis, melainkan sebagai perangkat wacana yang membentuk cara publik mengartikulasikan keberatan, solidaritas, dan tuntutan. Fenomena #IndonesiaGelap muncul dalam konteks sosial-politik yang memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat, khususnya mahasiswa, dengan arah kebijakan pemerintah pada awal tahun 2025. Laporan Attar [2] menyebutkan bahwa pada 20 Februari 2025 ribuan mahasiswa menggelar aksi bertajuk Dark Indonesia di berbagai kota sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi melemahkan sistem dukungan sosial serta mengancam masa depan generasi muda. Aksi serupa berlanjut pada 21 Februari 2025 dengan partisipasi mahasiswa dan aktivis di berbagai kota besar di Indonesia [22]. Hawnan [10] juga melaporkan bahwa demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap telah berlangsung di Jakarta sejak 17 Februari 2025 dengan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama berbagai elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek.

Seiring berkembangnya aksi di ruang fisik, diskursus mengenai #IndonesiaGelap juga berkembang secara masif di ruang publik digital, khususnya pada Platform X. Berdasarkan laporan Research Hub, hingga 24 Februari 2025 #IndonesiaGelap telah digunakan dalam lebih dari 3 juta unggahan di Platform X [16]. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil analisis Jangkara Data Lab yang menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2025 #IndonesiaGelap menghasilkan lebih dari 13 juta engagement, dengan 81% percakapan didominasi sentimen negatif serta mencapai puncak intensitas percakapan pada tanggal 17 dan 21 Februari 2025 [27]. Tingginya volume percakapan tersebut menunjukkan bahwa #IndonesiaGelap tidak hanya berkembang sebagai simbol mobilisasi aksi di ruang fisik, tetapi juga menjadi ruang artikulasi kritik publik yang mempertemukan beragam persoalan, mulai dari kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hingga demokrasi dan kebebasan sipil dalam satu arena komunikasi digital.

Dengan demikian, #IndonesiaGelap tidak lagi dipahami sekadar sebagai tagar yang mengikuti dinamika media sosial, melainkan berkembang menjadi ruang artikulasi kritik publik yang menghimpun berbagai kegelisahan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Tingginya intensitas percakapan di Platform X menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna kolektif mengenai berbagai persoalan publik. Kondisi tersebut menjadikan #IndonesiaGelap sebagai fenomena yang penting untuk dikaji, terutama untuk memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital melalui interaksi dan praktik komunikasi yang berlangsung di Platform X.

Percakapan yang mengiringi #IndonesiaGelap memperlihatkan adanya indikasi kuat munculnya kritik publik dalam ruang digital. Dalam berbagai pembahasan di platform X dan pemberitaan arus utama, tagar ini dikaitkan dengan penolakan terhadap kebijakan publik, kekhawatiran atas pendidikan, kesejahteraan, arah demokrasi, serta relasi antara negara dan warga negara. Dalam kerangka komunikasi politik digital, kritik semacam ini penting dipahami bukan hanya sebagai reaksi sesaat, melainkan sebagai praktik penandaan makna yang memperlihatkan bagaimana publik menafsirkan kebijakan negara dan memosisikan dirinya terhadap otoritas. Namun demikian, bentuk, makna, dan konstruksi kritik publik dalam percakapan #IndonesiaGelap belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Fenomena tersebut masih memerlukan pembacaan yang lebih sistematis agar tidak berhenti pada pengamatan permukaan mengenai viralitas, tetapi dapat menyingkap bagaimana warga membangun narasi kritik, solidaritas, dan posisi politik melalui komunikasi digital. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini bukan lagi mengenai apa saja isu yang dikritik oleh masyarakat, melainkan bagaimana berbagai kritik tersebut saling dihubungkan sehingga membentuk konstruksi kritik publik dalam ruang digital.

Secara teoretis, fenomena tersebut lebih tepat dipahami melalui perspektif Discourse Theory yang dikembangkan oleh Laclau dan Mouffe. Dalam perspektif ini, kritik publik tidak dipandang sebagai sekadar ekspresi pendapat individual, melainkan sebagai hasil dari praktik artikulasi yang

menghubungkan berbagai tuntutan sosial ke dalam konfigurasi makna tertentu. Makna suatu isu tidak bersifat tetap ataupun melekat secara alamiah, melainkan dibentuk melalui relasi antartanda yang terus diproduksi dan dinegosiasikan dalam praktik diskursif. Dengan demikian, percakapan yang berkembang melalui #IndonesiaGelap dapat dipahami sebagai arena diskursif tempat berbagai kritik terhadap pendidikan, kesejahteraan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan masa depan generasi diartikulasikan sehingga membentuk konstruksi kritik publik.

Dari sisi penelitian terdahulu, kajian mengenai media sosial sebagai ruang publik digital, aktivisme tagar, dan partisipasi politik digital telah berkembang cukup luas. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa hashtag telah menjadi sarana komunikasi yang penting dalam berbagai gerakan sosial [28]. Studi tentang #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw memperlihatkan bahwa tagar dapat digunakan untuk mengikuti, membahas, dan mengomentari kebijakan publik dalam konteks engagement politik di ruang media sosial [25]. Kajian tentang #PercumaLaporPolisi juga menegaskan bahwa hashtag activism dapat dipahami sebagai fenomena demokrasi siber yang bersandar pada perluasan akses internet dan kebiasaan bermedia sosial [33]. Di sisi lain, literatur tentang partisipasi politik digital menunjukkan bahwa media sosial mendorong keterlibatan publik yang lebih cepat, terbuka, dan terdesentralisasi, sekaligus menghadirkan tantangan berupa polarisasi dan literasi digital yang belum merata [18].

Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fungsi media sosial dan hashtag sebagai medium komunikasi politik digital. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada fungsi hashtag sebagai media aktivisme, mobilisasi sosial, atau partisipasi politik digital. Kajian yang secara khusus menjelaskan mekanisme bagaimana berbagai tuntutan sosial diartikulasikan, dihubungkan, dan dikonstruksikan menjadi kritik publik melalui #IndonesiaGelap, terutama dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif (QCA) dan perspektif Discourse Theory Laclau dan Mouffe, masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena #IndonesiaGelap menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna melalui praktik-praktik diskursif. Meskipun berbagai penelitian telah membahas aktivisme tagar, partisipasi politik digital, dan penggunaan media sosial dalam gerakan sosial, masih terbatas kajian yang menjelaskan bagaimana beragam tuntutan sosial diartikulasikan, dihubungkan, dan disatukan melalui sebuah hashtag hingga membentuk kritik publik sebagai suatu konstruksi makna. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis proses tersebut pada #IndonesiaGelap di Platform X melalui metode analisis isi kualitatif (QCA) dengan menggunakan Discourse Theory dari Laclau dan Mouffe sebagai perspektif utama. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul Konstruksi Kritik Publik dalam Ruang Publik Digital pada #IndonesiaGelap di Platform X.

2. METODE

2.1 Pendekatan, Lokasi, dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Paradigma konstruktivis memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan dibentuk melalui proses interaksi, pengalaman, bahasa, serta praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Berger & Luckmann, 1971). Oleh karena itu, makna suatu fenomena dipahami sebagai hasil konstruksi yang terus dibangun dan dinegosiasikan oleh individu maupun kelompok melalui proses komunikasi. Dalam penelitian ini, kritik publik pada #IndonesiaGelap dipahami sebagai konstruksi makna yang dibentuk oleh pengguna Platform X melalui berbagai unggahan yang merepresentasikan pandangan, pengalaman, serta penilaian mereka terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan penyelenggaraan negara.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data, bukan mengukur hubungan antarvariabel ataupun menguji hipotesis tertentu (Kriyantono, 2016). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital berdasarkan makna yang terkandung dalam unggahan pengguna Platform X. Dengan demikian, perhatian penelitian tidak diarahkan pada jumlah kemunculan suatu fenomena, melainkan pada bagaimana berbagai elemen kritik publik diidentifikasi, dihubungkan, dan diinterpretasikan sehingga membentuk suatu konstruksi kritik publik.

Pemilihan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital pada #IndonesiaGelap di Platform X. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data berupa unggahan pengguna Platform X, kemudian dianalisis secara bertahap melalui proses open coding, refinement coding, pemetaan elemen kritik publik, analisis koeksistensi, serta analisis pola kemunculan bersama antarelemen. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan Discourse Theory Laclau dan Mouffe untuk menjelaskan bagaimana berbagai elemen kritik publik diartikulasikan, dipusatkan pada satu penanda bersama, membentuk solidaritas politik, serta menghasilkan konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau sumber diperolehnya data yang digunakan untuk menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Platform X yang menjadi media sosial tempat pengguna menyampaikan opini, kritik, serta pandangan mengenai berbagai persoalan publik melalui penggunaan #IndonesiaGelap.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada unggahan yang menggunakan #IndonesiaGelap. Pemilihan hashtag tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa #IndonesiaGelap menjadi salah satu ruang percakapan publik yang mempertemukan berbagai kritik masyarakat terhadap kondisi nasional. Melalui hashtag tersebut, pengguna menyampaikan beragam pandangan dan kritik yang berkaitan dengan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, kondisi ekonomi, pendidikan, demokrasi, serta isu-isu publik lainnya. Oleh karena itu, hashtag #IndonesiaGelap dipandang sebagai sumber data yang sesuai untuk memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital di Platform X.

Penelitian ini berfokus pada konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital melalui #IndonesiaGelap di Platform X. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan melalui berbagai unggahan pengguna Platform X yang memuat pandangan, kritik, maupun tuntutan terhadap berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan penyelenggaraan negara.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah unggahan (post) yang dipublikasikan oleh pengguna Platform X dengan menggunakan #IndonesiaGelap. Unggahan dipilih sebagai unit analisis karena memuat informasi yang merepresentasikan kritik publik terhadap berbagai isu yang berkembang dalam ruang publik digital. Setiap unggahan dianalisis sebagai satu unit analisis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kritik publik, perangkaian berbagai elemen, serta pola konstruksi kritik yang terbentuk.

2.2 Pengumpulan dan Pemilihan Data

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berupa unggahan (post) pengguna Platform X yang menggunakan #IndonesiaGelap. Unggahan tersebut menjadi sumber utama penelitian karena memuat berbagai bentuk kritik publik terhadap isu sosial, politik, ekonomi, pendidikan, serta penyelenggaraan negara. Seluruh data primer yang dianalisis merupakan unggahan yang telah memenuhi kriteria pemilihan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah,

hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta publikasi lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder terutama digunakan untuk mendukung pembahasan mengenai ruang publik digital, Platform X, kritik publik, Discourse Theory Laclau dan Mouffe, serta konsep-konsep lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, data sekunder juga dimanfaatkan untuk memberikan konteks terhadap perkembangan #IndonesiaGelap sehingga dapat memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer berupa unggahan pengguna Platform X yang menggunakan #IndonesiaGelap. Data dikumpulkan dengan mendokumentasikan unggahan yang dipublikasikan, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Penentuan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak bertujuan memperoleh data dalam jumlah yang besar, melainkan memilih data yang paling relevan dan kaya informasi (information-rich) untuk menjawab fokus penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Patton (2002), purposive sampling merupakan teknik pemilihan data berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga data yang dipilih mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Unggahan dipublikasikan selama periode 17–21 Februari 2025, yaitu periode ketika intensitas percakapan mengenai hashtag tersebut berada pada tingkat yang tinggi. Unggahan memuat kritik, opini, atau pandangan mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, demokrasi, maupun kebijakan publik di Indonesia. Unggahan dapat diakses secara publik sehingga tidak melanggar privasi pengguna. Unggahan yang hanya berisi promosi, spam, atau tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian tidak dimasukkan sebagai data penelitian.

2.3 Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk mengidentifikasi elemen-elemen kritik publik yang terkandung dalam unggahan pengguna Platform X serta menginterpretasikan hubungan makna antarelemen tersebut dalam membentuk konstruksi kritik publik. Analisis dilakukan sejak data selesai dikumpulkan hingga diperoleh pemahaman yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses analisis terdiri atas dua tahapan utama. Tahap pertama bertujuan mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai elemen kritik publik melalui proses pengodean secara induktif. Tahap kedua bertujuan menginterpretasikan relasi antarelemen tersebut menggunakan perspektif Discourse Theory Laclau dan Mouffe sehingga dapat dijelaskan bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital melalui #IndonesiaGelap.

Tahap awal analisis dilakukan dengan membaca seluruh unggahan secara berulang untuk memahami konteks serta mengidentifikasi berbagai bentuk kritik publik yang terkandung dalam data penelitian. Selanjutnya dilakukan open coding, yaitu proses memberikan kode terhadap setiap unit makna yang muncul dalam unggahan tanpa menggunakan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kode merepresentasikan isu, gagasan, maupun bentuk kritik yang disampaikan oleh pengguna Platform X.

Setelah proses open coding selesai, peneliti melakukan refinement coding dengan membandingkan, menyederhanakan, dan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna. Tahap ini bertujuan mengurangi duplikasi, memperjelas batas antarkategori, serta menghasilkan elemen-elemen kritik publik yang lebih konseptual dan representatif terhadap keseluruhan data. Hasil dari proses tersebut berupa delapan belas elemen kritik publik. Selanjutnya, setiap elemen dipetakan berdasarkan kemunculannya dalam setiap unggahan sehingga diperoleh matriks koeksistensi elemen kritik publik serta pola kemunculan bersama antarelemen. Kedua hasil tersebut menjadi dasar dalam proses interpretasi pada tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya merupakan interpretasi terhadap temuan penelitian menggunakan Discourse Theory yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Pada tahap ini, elemen-elemen

kritik publik yang telah diidentifikasi tidak lagi dipahami sebagai kategori yang berdiri sendiri, melainkan dianalisis berdasarkan hubungan diskursif yang terbentuk di antara elemen-elemen tersebut. Interpretasi dilakukan menggunakan enam konsep utama dalam Discourse Theory, yaitu articulation, nodal point, empty signifier, chain of equivalence, antagonism, dan hegemony. Konsep articulation digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai elemen kritik dirangkai menjadi satu hubungan makna. Selanjutnya, konsep nodal point dan empty signifier digunakan untuk mengidentifikasi penanda yang menjadi pusat penyatuan berbagai tuntutan publik. Analisis kemudian dilanjutkan menggunakan konsep chain of equivalence dan antagonism untuk memahami pembentukan solidaritas politik serta batas antagonistik yang berkembang dalam wacana. Terakhir, konsep hegemony digunakan untuk menjelaskan bagaimana keseluruhan hubungan tersebut menghasilkan konstruksi makna yang dominan mengenai kritik publik dalam #IndonesiaGelap.

Keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada kriteria trustworthiness yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985, dalam Amin et al., 2021), yaitu credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Penggunaan keempat kriteria tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dilakukan secara sistematis sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang memadai.

Kredibilitas dicapai melalui pembacaan data secara berulang (iterative reading) terhadap seluruh unggahan yang menjadi objek penelitian sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konteks setiap data. Selain itu, proses analisis dilakukan secara bertahap melalui open coding, refinement coding, dan interpretasi menggunakan Discourse Theory Laclau dan Mouffe untuk memastikan bahwa temuan benar-benar didasarkan pada data yang dianalisis.

Kebergantungan dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari penentuan fokus penelitian, penentuan data menggunakan purposive sampling, proses pengumpulan data, open coding, refinement coding, hingga interpretasi menggunakan Discourse Theory Laclau dan Mouffe. Dokumentasi tersebut membentuk audit trail yang memungkinkan proses penelitian ditelusuri kembali secara logis dan konsisten.

Konfirmabilitas dijaga dengan memastikan bahwa seluruh hasil interpretasi didasarkan pada data empiris, bukan pada pandangan subjektif peneliti. Oleh karena itu, setiap temuan dalam penelitian ini ditelusuri kembali pada unggahan yang dianalisis melalui proses open coding, refinement coding, serta didukung oleh penyajian identitas data berupa kode unggahan. Dengan demikian, hubungan antara data, proses analisis, dan hasil interpretasi dapat ditelusuri secara jelas sehingga meningkatkan objektivitas penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemetaan Elemen Kritik Publik

Kemunculan #IndonesiaGelap merupakan bagian dari perkembangan wacana publik di Platform X pada Februari 2025. Hashtag tersebut muncul sebagai respons masyarakat terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian publik pada saat itu. Beragam peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan mendorong meningkatnya penggunaan #IndonesiaGelap sebagai media untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan pandangan mengenai kondisi nasional.

Selama periode 17–21 Februari 2025, penggunaan #IndonesiaGelap menunjukkan intensitas yang tinggi. Unggahan berasal dari berbagai pengguna dengan latar belakang yang beragam, seperti mahasiswa, akademisi, pekerja, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum. Berbagai unggahan tersebut memuat kritik terhadap kebijakan publik, kondisi ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, demokrasi, serta isu-isu sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa #IndonesiaGelap berkembang sebagai wadah penyampaian beragam kritik publik terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Tahap pemetaan elemen kritik publik dilakukan setelah proses open coding dan refinement coding terhadap 87 unggahan pengguna Platform X yang menggunakan #IndonesiaGelap. Pada tahap open coding, setiap unggahan diuraikan menjadi sejumlah kode awal yang merepresentasikan isu, kritik, maupun tuntutan yang disampaikan pengguna. Selanjutnya, melalui proses refinement, kode-kode yang memiliki makna serupa dibandingkan, disederhanakan, dan dikelompokkan sehingga menghasilkan elemen-elemen yang lebih konseptual. Proses ini bertujuan untuk mengurangi duplikasi makna, meningkatkan konsistensi kategorisasi, serta membentuk representasi yang lebih sistematis terhadap berbagai bentuk kritik publik yang terdapat dalam data penelitian.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak terkonsentrasi pada satu isu tertentu, melainkan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Berbagai isu tersebut kemudian dipetakan menjadi delapan belas elemen kritik publik yang merepresentasikan fokus perhatian pengguna Platform X terhadap kondisi yang mereka kritik. Elemen-elemen tersebut disusun berdasarkan hasil refinement coding dan menjadi dasar untuk menganalisis perangkaian berbagai elemen pada tahapan berikutnya.

Tabel 1. Pemetaan dan Distribusi Elemen Kritik Publik Hasil Refinement

Elemen Kritik Publik	Jumlah Unggahan
Pendidikan	18
Kebijakan Publik	15
Ketenagakerjaan	10
Tata Kelola Pemerintahan	9
Legitimasi Kepemimpinan	9
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	9
Represi Aparat Negara	9
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan	8
Prioritas Anggaran Negara	8
Praktik dan Orientasi Kekuasaan Politik	6
Masa Depan Generasi dan Bangsa	6
Kebebasan Berekspresi	6
Partisipasi Publik	4
Hak-Hak Warga Negara	3
Akuntabilitas dan Pengawasan Lembaga Negara	3
Akses Pendidikan	3
Kondisi Ekonomi Nasional	2
Demokrasi dan Negara Hukum	2

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terlihat bahwa elemen-elemen kritik publik mencakup dimensi politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga demokrasi dan kebebasan sipil. Variasi elemen tersebut menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan melalui #IndonesiaGelap tidak hanya diarahkan pada evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup persoalan tata kelola pemerintahan, relasi kekuasaan, kondisi sosial-ekonomi, kualitas demokrasi, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, hasil refinement coding memperlihatkan bahwa kritik publik yang terdapat dalam data penelitian terdiri atas berbagai elemen yang merepresentasikan beragam persoalan yang menjadi perhatian pengguna Platform X.

Kedelapan belas elemen tersebut merupakan hasil kategorisasi terhadap keseluruhan data penelitian. Pada tahap ini, setiap elemen masih dipahami sebagai temuan yang berdiri sendiri berdasarkan hasil analisis data. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan memaparkan bagaimana elemen-elemen tersebut muncul secara bersamaan dalam satu unggahan sehingga membentuk pola koeksistensi dan keterkaitan antarelemen yang menjadi dasar analisis pada tahap berikutnya.

3.2 Koeksistensi dan Pola Kemunculan Elemen Kritik

Hasil pemetaan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap terdiri atas delapan belas elemen yang merepresentasikan beragam isu yang menjadi perhatian pengguna Platform X. Namun demikian, keberadaan elemen-elemen tersebut tidak selalu muncul secara terpisah dalam setiap unggahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian unggahan memuat lebih dari satu elemen kritik publik secara bersamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam satu unggahan, pengguna tidak hanya menyampaikan kritik terhadap satu persoalan tertentu, tetapi juga mengaitkan beberapa isu dalam satu kesatuan narasi.

Kemunculan beberapa elemen dalam satu unggahan menunjukkan adanya koeksistensi elemen kritik publik dalam data penelitian. Dengan kata lain, satu unggahan dapat merepresentasikan lebih dari satu fokus kritik yang hadir secara bersamaan. Sebaliknya, terdapat pula sejumlah unggahan yang hanya memuat satu elemen sehingga hanya menggambarkan satu fokus kritik. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi pola kemunculan bersama antarelemen, penelitian ini memfokuskan analisis pada unggahan yang memuat dua atau lebih elemen kritik publik, karena hanya pada unggahan tersebut koeksistensi elemen dapat diamati secara empiris.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap keseluruhan data penelitian, diperoleh sejumlah unggahan yang mengandung dua hingga lima elemen kritik publik dalam satu unit analisis. Setiap unggahan kemudian dipetakan berdasarkan elemen-elemen yang muncul di dalamnya sehingga diperoleh matriks koeksistensi elemen kritik publik. Pemetaan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kemunculan bersama berbagai elemen kritik dalam #IndonesiaGelap.

Berdasarkan data terlihat bahwa koeksistensi elemen kritik publik muncul dalam berbagai variasi kombinasi antarelemen. Beberapa unggahan memperlihatkan keterkaitan dua elemen, sementara unggahan lainnya memuat tiga, empat, hingga lima elemen secara bersamaan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap cenderung tidak dibangun melalui satu isu secara tunggal, melainkan melalui penggabungan berbagai elemen kritik dalam satu unggahan.

Pada tahap ini, koeksistensi elemen dipahami sebagai temuan empiris yang menunjukkan kemunculan beberapa elemen kritik publik secara bersamaan dalam satu unit analisis. Temuan tersebut belum dimaknai sebagai hubungan konseptual ataupun struktur diskursif, melainkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antarelemen yang akan dipaparkan pada subbab berikutnya.

Setelah dilakukan pemetaan terhadap unggahan yang memuat dua atau lebih elemen kritik publik, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pola kemunculan bersama antarelemen dalam keseluruhan data penelitian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kombinasi elemen yang ditemukan pada setiap unggahan muncul secara acak atau memperlihatkan kecenderungan tertentu. Dengan demikian, fokus analisis pada tahap ini bukan lagi pada identifikasi elemen ataupun jumlah kemunculannya, melainkan pada pola kemunculan bersama antarelemen yang berulang dalam berbagai unggahan pengguna Platform X.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa beberapa kombinasi elemen muncul secara berulang pada lebih dari satu unggahan, sedangkan kombinasi lainnya hanya muncul pada konteks tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak hanya memuat berbagai elemen secara bersamaan, tetapi juga memperlihatkan pola kombinasi yang relatif konsisten dalam data penelitian. Untuk memberikan gambaran mengenai pola tersebut, setiap pasangan elemen yang muncul secara bersamaan kemudian direkapitulasi berdasarkan frekuensi kemunculannya. Hasil rekapitulasi pola kemunculan bersama elemen kritik publik disajikan pada Tabel 4.3.

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa tidak seluruh kombinasi elemen memiliki tingkat kemunculan yang sama. Beberapa pasangan elemen ditemukan berulang pada sejumlah unggahan, sedangkan pasangan lainnya hanya muncul satu kali. Variasi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa setiap elemen kritik memiliki kecenderungan untuk muncul bersama elemen-elemen tertentu dalam konteks yang berbeda. Dengan kata lain, kemunculan bersama elemen kritik publik dalam

#IndonesiaGelap memperlihatkan pola yang tidak seragam, melainkan membentuk kombinasi-kombinasi yang berulang pada sejumlah unggahan.

Pada tahap ini, pola kemunculan bersama tersebut dipahami sebagai hasil analisis empiris terhadap karakteristik data penelitian. Temuan ini belum dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan konseptual ataupun struktur makna antarelelemen, melainkan untuk menunjukkan adanya kecenderungan kemunculan bersama yang dapat diamati secara langsung dari data. Pola-pola tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menginterpretasikan hubungan makna antarelelemen pada bagian pembahasan.

Berdasarkan hasil pemetaan elemen, identifikasi koeksistensi, dan pola kemunculan bersama antarelelemen, terlihat bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak direpresentasikan sebagai kumpulan isu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kumpulan elemen yang hadir secara bersamaan dalam berbagai unggahan pengguna Platform X. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran empiris mengenai karakteristik kritik publik yang berkembang dalam data penelitian sekaligus menjadi landasan untuk melakukan interpretasi pada bagian pembahasan. Oleh karena itu, subbab berikutnya akan membahas temuan-temuan tersebut menggunakan perspektif Discourse Theory Laclau dan Mouffe untuk menjelaskan bagaimana berbagai elemen kritik publik membentuk konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital.

Tabel 2. Pola Kemunculan Bersama Elemen Kritik Publik

No.	Kombinasi Elemen	Frekuensi
1	Represi Aparat Negara ↔ Kebebasan Berekspresi	3
2	Prioritas Anggaran Negara ↔ Pendidikan	3
3	Kebijakan Publik ↔ Praktik dan Orientasi Kekuasaan Politik	2
4	Kebijakan Publik ↔ Legitimasi Kepemimpinan	2
5	Kebijakan Publik ↔ Masa Depan Generasi dan Bangsa	2
6	Ketenagakerjaan ↔ Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	3
7	Pendidikan ↔ Masa Depan Generasi dan Bangsa	2
8	Kebijakan Publik ↔ Pendidikan	1
9	Kebijakan Publik ↔ Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	1
10	Prioritas Anggaran Negara ↔ Tata Kelola Pemerintahan	1
11	Prioritas Anggaran Negara ↔ Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	1
12	Ketenagakerjaan ↔ Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan	1
13	Ketenagakerjaan ↔ Masa Depan Generasi dan Bangsa	1
14	Tata Kelola Pemerintahan ↔ Akses Pendidikan	1
15	Represi Aparat Negara ↔ Demokrasi dan Negara Hukum	1
16	Represi Aparat Negara ↔ Hak-Hak Warga Negara	1
17	Legitimasi Kepemimpinan ↔ Demokrasi dan Negara Hukum	1

3.3 Konstruksi Kritik sebagai Artikulasi Diskursif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak dikonstruksikan melalui satu isu yang berdiri sendiri, melainkan melalui penggabungan berbagai elemen kritik dalam satu unggahan. Temuan pada bagian hasil memperlihatkan bahwa pengguna Platform X cenderung menghubungkan persoalan kebijakan publik, praktik dan orientasi kekuasaan politik, pendidikan, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan ekonomi, hingga demokrasi dan kebebasan sipil ke dalam satu rangkaian kritik. Dengan demikian, kritik yang dibangun tidak lagi merepresentasikan persoalan yang terpisah-pisah, tetapi membentuk suatu kesatuan narasi mengenai kondisi negara yang dipersepsikan sedang menghadapi berbagai persoalan secara bersamaan.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa pengguna Platform X tidak memosisikan setiap persoalan sebagai isu yang berdiri sendiri. Sebaliknya, berbagai elemen kritik dirangkai dan dihubungkan ke dalam satu narasi yang lebih luas sehingga membentuk kritik publik yang bersifat

multidimensional. Dengan kata lain, hubungan antarelelemen yang ditemukan dalam data penelitian bukan sekadar menunjukkan kemunculan beberapa isu secara bersamaan, tetapi memperlihatkan adanya proses perangkaian berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan demokrasi menjadi satu konstruksi kritik publik. Pola inilah yang selanjutnya dianalisis menggunakan konsep articulation dalam Discourse Theory Laclau dan Mouffe untuk memahami bagaimana berbagai elemen tersebut memperoleh makna melalui hubungan yang dibangun di dalam wacana.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui konsep articulation dalam Discourse Theory yang dikembangkan oleh Laclau dan Mouffe, yaitu praktik diskursif yang menghubungkan berbagai tanda (signs) ke dalam suatu hubungan sehingga identitas dan makna setiap tanda dibentuk melalui keterkaitannya dengan tanda-tanda lain. Oleh karena itu, suatu elemen tidak memiliki makna yang bersifat tetap ataupun berdiri sendiri, tetapi memperoleh maknanya melalui relasi yang dibangun dengan elemen-elemen lain dalam suatu diskursus. Konsep ini menjelaskan bahwa pembentukan makna merupakan hasil dari proses menghubungkan berbagai tanda ke dalam satu struktur wacana, bukan berasal dari karakteristik masing-masing tanda secara terpisah.

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, praktik artikulasi tampak ketika pengguna Platform X menghubungkan berbagai elemen kritik publik ke dalam satu narasi mengenai kondisi negara. Hubungan antara kebijakan publik, praktik dan orientasi kekuasaan politik, pendidikan, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, hingga demokrasi dan kebebasan sipil menunjukkan bahwa elemen-elemen tersebut tidak diposisikan sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan memperoleh makna melalui keterkaitannya dengan elemen lain. Dengan demikian, relasi antarelelemen yang ditemukan dalam penelitian ini tidak sekadar menunjukkan koeksistensi beberapa isu dalam satu ungghahan, tetapi memperlihatkan bagaimana pengguna secara aktif membangun keterkaitan makna antarpersoalan sehingga menghasilkan konstruksi kritik publik yang lebih luas.

3.4 #IndonesiaGelap sebagai Nodal Point dan Empty Signifier

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai elemen kritik publik dalam #IndonesiaGelap dihubungkan melalui praktik artikulasi sehingga membentuk satu kesatuan makna. Namun, hubungan tersebut tidak berlangsung tanpa adanya pusat yang mengorganisasikan berbagai elemen tersebut. Dalam suatu diskursus, elemen-elemen yang telah diartikulasikan memerlukan tanda yang berfungsi sebagai titik rujukan bersama sehingga hubungan antarelelemen tidak berkembang secara terpisah, melainkan membentuk satu konstruksi makna yang relatif utuh. Oleh karena itu, setelah memahami bagaimana berbagai elemen kritik dihubungkan, pembahasan selanjutnya berfokus pada tanda yang menjadi pusat pengikat seluruh elemen kritik publik tersebut.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui konsep nodal point dalam Discourse Theory Laclau dan Mouffe. Nodal point merupakan tanda istimewa (privileged sign) yang berperan mengikat berbagai tanda lain sehingga membentuk struktur makna yang relatif stabil. Melalui proses artikulasi, berbagai elemen yang sebelumnya memiliki makna yang beragam diorganisasikan di sekitar satu tanda tertentu sehingga hubungan antarelelemen menjadi lebih koheren dalam suatu diskursus.

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian, #IndonesiaGelap berfungsi sebagai nodal point karena menjadi pusat pengorganisasian berbagai elemen kritik publik yang telah diartikulasikan. Makna hashtag tersebut tidak dibentuk oleh satu isu tertentu, melainkan oleh akumulasi hubungan antara berbagai elemen kritik yang berkembang dalam ruang publik digital. Artinya, #IndonesiaGelap tidak memperoleh maknanya dari karakteristik hashtag itu sendiri, melainkan dari relasi yang dibangun dengan berbagai elemen kritik publik yang mengitarinya. Dengan kata lain, kebijakan publik, pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tata kelola pemerintahan, hingga demokrasi dan kebebasan sipil memperoleh keterhubungan makna karena seluruh elemen tersebut dipusatkan pada #IndonesiaGelap. Oleh sebab itu, hashtag tersebut berfungsi sebagai titik referensi bersama yang menyatukan berbagai persoalan ke dalam satu konstruksi kritik terhadap kondisi negara.

Fungsi tersebut sekaligus memperlihatkan karakter #IndonesiaGelap sebagai empty signifier. Dalam pemikiran Laclau dan Mouffe, empty signifier merupakan tanda yang memiliki kapasitas untuk menghimpun berbagai tuntutan sosial yang berbeda tanpa dibatasi oleh satu makna yang bersifat tetap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa #IndonesiaGelap tidak digunakan secara eksklusif untuk merepresentasikan satu persoalan tertentu, melainkan menjadi wadah bagi beragam kritik mengenai pendidikan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, demokrasi, hak-hak warga negara, hingga kebebasan berekspresi. Keberagaman elemen kritik yang dihimpun menunjukkan bahwa makna #IndonesiaGelap tidak melekat pada satu isu tertentu, tetapi tetap terbuka untuk diisi oleh berbagai tuntutan publik yang berbeda.

3.5 Chain of Equivalence dan Antagonism

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai elemen kritik publik berhasil dihubungkan melalui praktik artikulasi dan dipusatkan pada #IndonesiaGelap sebagai nodal point. Namun, proses tersebut tidak hanya menghasilkan keterhubungan makna antarelelemen, tetapi juga membentuk hubungan yang lebih luas di antara berbagai tuntutan publik. Ketika beragam persoalan seperti kebijakan publik, pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan, tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kebebasan sipil ditempatkan dalam satu ruang diskursif yang sama, berbagai tuntutan tersebut tidak lagi dipahami sebagai persoalan yang terpisah, melainkan berkembang menjadi kepentingan kolektif yang saling menguatkan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep chain of equivalence dalam Discourse Theory Laclau dan Mouffe. Hubungan ekuivalensi tidak menghapus perbedaan setiap tuntutan, tetapi membangun kesetaraan di antara berbagai tuntutan tersebut karena semuanya diposisikan sebagai bagian dari persoalan yang sama. Dengan demikian, berbagai elemen kritik tidak kehilangan karakteristiknya masing-masing, tetapi memperoleh posisi yang setara sebagai bagian dari kritik publik terhadap kondisi negara.

Pembentukan chain of equivalence tersebut berlangsung bersamaan dengan munculnya hubungan antagonistik. Dalam pemikiran Laclau dan Mouffe, antagonisme merupakan proses pembentukan batas politik antara identitas kolektif "kami" (we) dan pihak yang diposisikan sebagai "mereka" (they). Identitas kolektif tidak terbentuk hanya melalui kesamaan tuntutan, tetapi juga melalui keberadaan pihak yang dipandang sebagai penyebab terhambatnya pemenuhan tuntutan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak berhenti pada proses menghubungkan berbagai elemen kritik ataupun memusatkannya pada satu tanda bersama. Praktik diskursif tersebut berkembang lebih jauh dengan membentuk hubungan ekuivalensi antartuntutan sosial sekaligus menghasilkan batas antagonistik yang membedakan identitas kolektif masyarakat dengan pihak yang menjadi sasaran kritik. Melalui proses tersebut, berbagai tuntutan yang semula berasal dari persoalan yang berbeda tidak hanya saling terhubung, tetapi juga memperoleh orientasi politik yang sama sehingga membentuk solidaritas politik yang menopang terbentuknya satu diskursus kritik publik yang relatif koheren dalam ruang publik digital.

3.6 Hegemoni Wacana Kritik Publik

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai elemen kritik publik dalam #IndonesiaGelap telah dihubungkan melalui praktik artikulasi, dipusatkan pada satu penanda bersama, serta dipersatukan melalui hubungan chain of equivalence dan antagonism. Rangkaian proses tersebut tidak hanya menghasilkan keterhubungan antarelelemen maupun solidaritas politik di antara berbagai tuntutan publik, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan terbentuknya satu pemaknaan yang dominan mengenai kondisi negara. Dengan kata lain, berbagai kritik yang semula berangkat dari isu yang berbeda berkembang menjadi satu konstruksi makna yang relatif koheren dalam ruang publik digital.

Dalam Discourse Theory, Laclau dan Mouffe memandang hegemoni sebagai proses ketika suatu diskursus berhasil membangun dan menstabilkan makna tertentu sehingga menjadi kerangka dominan dalam memahami realitas sosial. Hegemoni tidak dimaknai sebagai keadaan ketika seluruh pihak memiliki pandangan yang sama, melainkan ketika satu konstruksi makna memperoleh posisi yang lebih dominan dibandingkan kemungkinan makna lainnya. Dominasi tersebut dibentuk melalui praktik artikulasi yang menghubungkan berbagai elemen diskursif, memusatkannya pada satu nodal point, serta memperkuatnya melalui hubungan chain of equivalence dan antagonism.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hegemoni dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai bentuk dominasi kekuasaan negara terhadap masyarakat, melainkan sebagai dominasi suatu konstruksi makna dalam ruang publik digital. Hegemoni terbentuk ketika berbagai kritik yang berasal dari latar persoalan berbeda berhasil diartikulasikan menjadi satu konstruksi makna yang relatif koheren dan memperoleh posisi dominan dalam memaknai kondisi negara. Dengan demikian, yang menjadi hegemonik bukanlah masing-masing isu secara terpisah, melainkan keseluruhan wacana yang mengonstruksikan negara sebagai pihak yang dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan publik.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, konstruksi kritik publik dalam #IndonesiaGelap terbentuk melalui rangkaian proses diskursif yang saling berkaitan. Praktik articulation menghubungkan berbagai elemen kritik publik ke dalam satu hubungan makna, #IndonesiaGelap berfungsi sebagai nodal point sekaligus empty signifier yang menghimpun beragam tuntutan publik, sedangkan chain of equivalence dan antagonism membentuk solidaritas politik di antara berbagai tuntutan tersebut. Rangkaian proses tersebut pada akhirnya menghasilkan hegemoni wacana yang memaknai negara sebagai entitas yang dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan publik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kritik publik dikonstruksikan dalam ruang publik digital melalui #IndonesiaGelap di Platform X. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kritik publik dalam #IndonesiaGelap tidak dibentuk oleh satu isu yang berdiri sendiri, melainkan melalui hubungan berbagai elemen kritik publik yang saling berkaitan. Dari 87 unggahan yang dianalisis diperoleh delapan belas elemen kritik publik yang mencakup isu politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, demokrasi, dan hak-hak warga negara. Berbagai elemen tersebut tidak muncul secara terpisah, tetapi dirangkai dalam satu narasi kritik terhadap kondisi negara.

Analisis menggunakan Discourse Theory Laclau dan Mouffe menunjukkan bahwa konstruksi kritik publik berlangsung melalui praktik articulation yang menghubungkan berbagai elemen kritik ke dalam satu hubungan makna. Dalam proses tersebut, #IndonesiaGelap berfungsi sebagai nodal point sekaligus empty signifier yang menghimpun beragam tuntutan publik. Hubungan chain of equivalence membentuk solidaritas politik di antara berbagai tuntutan tersebut, sedangkan antagonism membangun batas antara masyarakat sebagai penyampai kritik dengan negara yang dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan publik. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan hegemoni wacana berupa dominannya konstruksi makna yang memosisikan negara sebagai entitas yang dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan publik.

Dengan demikian, #IndonesiaGelap tidak hanya berfungsi sebagai penanda percakapan di Platform X, tetapi juga menjadi pusat pembentukan wacana yang menghubungkan berbagai kritik publik ke dalam satu konstruksi makna bersama mengenai kondisi negara. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan tidak hanya berfokus pada Platform X, tetapi juga membandingkan konstruksi kritik publik yang berkembang pada platform media sosial lainnya, seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun platform digital lainnya. Perbandingan lintas platform diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana karakteristik masing-masing media memengaruhi konstruksi kritik publik dalam ruang publik digital.

REFERENSI

- [1] Arianto, B., “Melacak gerakan masyarakat sipil melalui tagar# reformasidikorupsi di Twitter. Jurnal Ilmu Komunikasi, 19(1), 51-68”, 2022.
- [2] Attar, H., “Aksi Indonesia Gelap di Jakarta Hari Ini: Mahasiswa Tuntut Prabowo Kaji Ulang Inpres tentang Efisiensi Anggaran. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/aksi-indonesia-gelap-di-jakarta-hari-ini-mahasiswa-tuntut-prabowo-kaji-ulang-inpres-tentang-efisiensi-anggaran-r15qW>”, 2025.
- [3] Arsyanda, D., Rodiah, S., & Rohman, A. S., “Peran akun autobase X (twitter) dalam memenuhi kebutuhan informasi followers. Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 13(1), 233-241”, 2025.
- [4] Aziz, K. S. A., Aini, T. N., & Lestari, A. D., “Social Interaction on Platform X (Case Study: Komunitas Murah-Murah). Athena: Journal of Social, Culture and Society, 3(3), 542-551”, 2025.
- [5] Bruns, A., & Burgess, J., “The use of Twitter hashtags in the formation of ad hoc publics. In Proceedings of the 6th European consortium for political research (ECPR) general conference 2011 (pp. 1-9). The European Consortium for Political Research (ECPR)”, 2011.
- [6] Castells, M., “Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. The network society: A cross-cultural perspective, 3-45”, 2004.
- [7] Fahmi, U., “Cultural Public Sphere: Tracking the Yogyakarta City Policy Agenda through the# JogjaOraDidol Hashtag on Twitter. Policy & Governance Review, 3(1), 73-90”, 2019.
- [8] Guntuku, S. C., Preotiuc-Pietro, D., Eichstaedt, J. C., & Ungar, L. H., “What twitter profile and posted images reveal about depression and anxiety. In Proceedings of the international AAAI conference on web and social media (Vol. 13, pp. 236-246)”, 2019.
- [9] Howarth, D., “Discourse. McGraw-Hill Education (UK)”, 2000.
- [10] Hawnan, Y., “Mahasiswa membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4655801/mahasiswa-membubarkan-diri-setelah-sempat-bersitegang-dengan-aparat>”, 2025.
- [11] Highfield, T., & Leaver, T., “A methodology for mapping Instagram hashtags. First Monday, 20(1), 1-11”, 2015.
- [12] Kemp, S., “Digital 2025: Indonesia. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>”, 2025.
- [13] Laclau, E., & Mouffe, C., “Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics (Vol. 8). Verso books”, 1985.
- [14] Lestari, D. W., & Ambarwati, R., “Social network analysis: understanding user behavior in threads. Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen, 12(1), 115-124”, 2024.
- [15] Masip, P., Ruiz-Caballero, C., & Suau, J., “Active audiences and social discussion on the digital public sphere. Review article. El profesional de la información, 28(2)”, 2019.
- [16] Muzzaki, M. R., “Tagar Indonesia Gelap dominasi platform X capai 3 juta postingan. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/tagar-indonesia-gelap-dominasi-platform-x-capai-3-juta-postingan-1211198>”, 2025.
- [17] Mukminin, M. S., Muhhit, A. A., Putra, L. D., Zolila, J., Khandoker, M. K., & Ahmed, A., “Power Representation and Public Resistance in the Hashtag Discourse# BubarkanDPR: A Critical Discourse Analysis. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 7(1), 54-72”, 2026.
- [18] Nusantara, G., & Subarsa, K. Y., “Social Media's Democratic Footprint: A Review of Political Participation Trends. Journal of Communication and Public Relations, 4(2), 261-278”, 2025.
- [19] Prabawati, L. P., Nurhidayah, S., & Elysa, S., “Corpus Analysis Discourse Study (CADS): Diskusi" Klitih" melalui Media sosial Twitter Sebagai Ruang Publik Pada Tahun 2022–2023. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 21(1), 43-57”, 2024.

- [20] Panjaitan, E. J. B., Tambunan, F. B., Fitriyani, M. N., & Rangkuti, R., "Illocutionary Acts in the Hashtag# KaburAjaDulu: A Cyber Activism Discourse Study on Social Media X. JL3T (Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching), 11(2), 283-302", 2025.
- [21] Papacharissi, Z., "Affective publics: Sentiment, technology, and politics. Oxford University Press", 2015.
- [22] Reuters., "Protesters extend "Dark Indonesia" rally against Prabowo's policies. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/protesters-extend-dark-indonesia-rally-against-prabowos-policies-2025-02-21/>", 2025.
- [23] Rustandi, L. R., "Disrupsi nilai keagamaan dalam dakwah virtual di media sosial sebagai komodifikasi agama di era digital. Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan, 3(1), 23-34", 2020.
- [24] Rachman, M. N. R., & Hasfi, N., "Komunikasi tanpa Deliberasi: Komunikasi Politik Online Konflik Agraria Wadas di Twitter @ganjarpranowo. Jurnal Audiens, 4(2), 182-202. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i2.16>", 2023.
- [25] Setiawan, A., Saputra, H. A., & Fridayani, H. D., "Political communication and public sphere democracy (An analysis: The hashtags usage of rejection the omnibus law 2020 on Twitter). Profetik: Jurnal Komunikasi, 14(1), 51-59", 2021.
- [26] Storsul, T., "Deliberation or self-presentation? Young people, politics and social media", 2014.
- [27] Shobirin, R., "Tagar #IndonesiaGelap raup 13 juta engagement di X, 81 persen sentimen negatif. Jakarta Times. <https://jakarta.times.co.id/news/berita/1il0e6es5/Tagar-IndonesiaGelap-Raup-13-Juta-Engagement-di-X-81-Persen-Sentimen-Negatif>", 2025.
- [28] Santos, M. B., Arambulo, M. H. Y., & Ilustre, R. G., "#Hashtag movements and digital activism: exploring cultural and critical perspectives for social change: a scoping review. Pantao Journal, 4(1), 19. <https://pantaojournal.com/2025/03/14/v4-i1-19/>", 2025.
- [29] Saeni, E., Cindrakasih, R. R., Azis, A., Rahardjo, A., & Atmaja, J., "POWER AND CRITICISM: THE DYNAMICS OF DIGITAL COMMUNICATION IN ONLINE PUBLIC SPACES. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 10(4), 1381-1389", 2025.
- [30] Suhendra, S., & Pratiwi, F. S., "Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. In Iapa Proceedings Conference (pp. 293-315)", 2024.
- [31] Stornaiuolo, A., "Contexts of Digital Socialization: Studying Adolescents' Interactions on Social Network SitesCommentary on Zizek. Human Development, 60(5), 233-238", 2017.
- [32] Wang, R., & Chu, K. H., "Networked publics and the organizing of collective action on Twitter: Examining the# Freebassel campaign. Convergence, 25(3), 393-408", 2019.
- [33] Wuriani, N. I., "Aktivisme tagar# percumalaporpolisi sebagai Zeitgeist demokrasi siber di Indonesia. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 20(2), 171-183", 2021.
- [34] X Corp. (n.d.). About X. X. Retrieved June 21, 2026, from <https://about.x.com/en>
- [35] X Corp. (n.d.). How to use hashtags. X Help Center. Retrieved June 21, 2026, from <https://help.x.com/en/using-x/how-to-use-hashtags>
- [36] X Corp. (n.d.). Public and protected posts. X Help Center. Retrieved June 21, 2026, from <https://help.x.com/en/safety-and-security/public-and-protected-posts>
- [37] X Corp. (n.d.). X trending FAQs. X Help Center. Retrieved June 21, 2026, from <https://help.x.com/en/using-x/x-trending-faqs>